

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia mendorong warga negara Indonesia memiliki kecakapan warga global, maka diperlukan kompetensi, karakter dan multiliterasi. Multiliterasi disini adalah literasi keuangan, literasi digital, numerasi, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan, literasi baca tulis. (kemdikbud.go.id, 2020). Literasi keuangan dinilai sebagai pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangan. Untuk mendukung perihal tersebut diperlukan pembinaan secara kontinue khususnya di Badan Usaha Milik Desa yang akan menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. (OJK, 2016).

Pemerintah Indonesia juga terus memotivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan desa agar masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dengan memperhatikan nilai-nilai yang berguna, agar tercapai kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Otonomi daerah juga memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Sutardi, et. al., 2017).

Menghadapi perihal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak perekonomian daerah khususnya desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Selaras dengan itu maka pemahaman literasi keuangan perlu ditingkatkan, sehingga pengembangan Badan Usaha Milik Desa menjadi lebih baik. Untuk menguasai semua itu juga tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Pemerintah Indonesia juga memotivasi semua sektor untuk mengadopsi teknologi untuk menunjang seluruh aktivitas operasionalnya.

Survey pada tahun 2014 penetrasi pengguna internet masyarakat Indonesia masih 34,9%. Dalam jangka waktu dua tahun jumlah pengguna internet mengalami kenaikan sebesar 16,9% sehingga menjadi 51,8% di tahun 2016 (OJK, 2017). Teknologi keuangan adalah pemanfaatan teknologi dan inovasi di sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan / atau model bisnis baru, yang berpotensi mengganggu stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan / atau efisiensi, ketersediaan, keamanan, dan keandalan sistem keuangan, sistem pembayaran. Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) membawa banyak manfaat bagi konsumen, pelaku bisnis dan perekonomian nasional, namun juga mengandung potensi risiko gangguan sistem keuangan jika tidak dimitigasi secara efektif.

Kondisi ekonomi Indonesia dua tahun terakhir tepatnya bulan November 2019 sampai akhir 2022 kurang bagus, pemerintah dan perusahaan diseluruh dunia mengalami tantangan berat, hampir seluruh sektor terkena dampak penurunan kondisi perekonomian, termasuk juga pemerintah, badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik swasta, dan termasuk juga badan usaha milik desa di seluruh Indonesia, (Amirya, 2021). Laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020 BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode sama pada tahun 2019.

Penguatan perekonomian dalam kondisi saat ini diwujudkan dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa. Karena hal tersebut adalah perwujudan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni dengan memotivasi operasional Badan Usaha Milik Desa. Landasan hukum yang melandasi berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pembentukan daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga usaha ekonomi desa dalam melakukan: a) peningkatan perekonomian desa; b) optimalisasi asset desa untuk kesejahteraan desa; c) peningkatan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; d) pengembangan rencana kerja sama usaha desa dengan pihak ketiga; e) upaya menciptakan peluang dan jaringan

pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa; f) penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa; dan g) peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Disamping itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa mempunyai 4 (empat) tujuan utama yaitu: meningkatkan perekonomian desa, Meningkatkan pendapatan asli desa, Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar hal tersebut dapat tercapai, maka badan usaha milik desa sebagai tulang punggung perekonomian desa haruslah memiliki kinerja keuangan yang baik, sehingga mampu bersaing dan menjalankan fungsinya dengan baik. (Sutardi, et. al., 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 mengenai kewenangan kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. (UU No. 6 Tahun 2014).

Badan usaha milik desa adalah salah satu badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, Badan usaha milik desa adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. Kekayaan tersebut kemudian sengaja dipisahkan untuk mengelola sejumlah aset, jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya demi masyarakat desa. Dibawah ini adalah gambar terkait dengan tingkat kesehatan usaha Badan Usaha Milik Desa yang terdata di kementerian desa.

Badan usaha milik desa se-Indonesia yang melakukan pengisian terkait cek kesehatan usaha sebanyak 1.369, dan kategori cek kesehatan usaha ada tiga yaitu; Bumdes Rintisan (termasuk bintang 1-2) ada 648, Bumdes Berkembang (termasuk

bintang 3) ada 496, Bumdes Maju (termasuk bintang 4-5) ada 225. Keadaan Badan Usaha Milik Desa tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



Sumber: bumdes.id

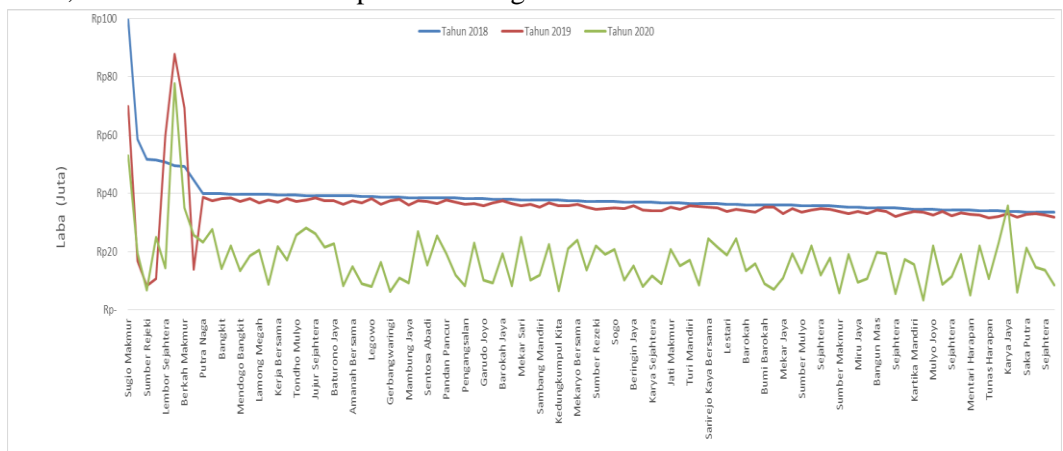
Gambar 1.1 Grafik Penyebaran Pengisian CKU (Cek Kesehatan Usaha) Bumdes

Berdasarkan Gambar 1.1 Penilaian kategori maju, berkembang dan perintis pada Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama yang meliputi tata kelola kelembagaan, aturan, usaha, administrasi dan pelaporan, permodalan dan dampak ekonomi kepada masyarakat. Penentuan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), masing-masing parameter memiliki pembobotan yang berbeda. Dalam hal ini, aspek usaha memiliki pembobotan paling tinggi yaitu 25%, kemudian diikuti oleh tata kelola kelembagaan 20% dan dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) kepada masyarakat memiliki bobot 20%. Parameter selanjutnya adalah terkait permodalan 15%, aturan 10% dan administrasi, pelaporan, dan pertanggung jawaban dengan bobot 10%.

Di kabupaten Lamongan terdapat 462 Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di 27 kecamatan yang berstatus perintis berjumlah 304, berstatus berkembang berjumlah 63, dan yang berstatus maju berjumlah 95. Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Lamongan ada yang sudah terintegrasi ke kementerian desa, dimana masing-masing Badan Usaha Milik Desa bergerak dalam Usaha jasa keuangan,

pasar desa, wisata desa, Hippam (Himpunan Pengguna Air Minum), wisata, waduk, peternakan, persewaan dan perdagangan. (PMD Lamongan, 2021).

Profitabilitas Badan Usaha Milik Desa yang dinilai bagus atau tidak dapat dilihat dari pendapatan (Putri, 2022). Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membuat keuntungan dan menunjukkan seberapa efisien manajemen perusahaan dalam membuat keuntungan tersebut darisemua kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (Muharramah, et. al., 2021). semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka modal sendiri yang dimiliki perusahaan juga besar dan dapat mempengaruhi rendahnya struktur modal. Artinya perusahaan yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal menghasilkan keuntungan atau laba maka perusahaan tersebut memakai modal sendiri (laba ditahan) dalam membiayai kegiatan operasional suatu perusahaan tanpa harus memakai dana dari luar (Mudjijah et. al., 2019). Dibawah ini adalah posisi laba yang Badan Usaha Milik selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 di Kabupaten Lamongan:



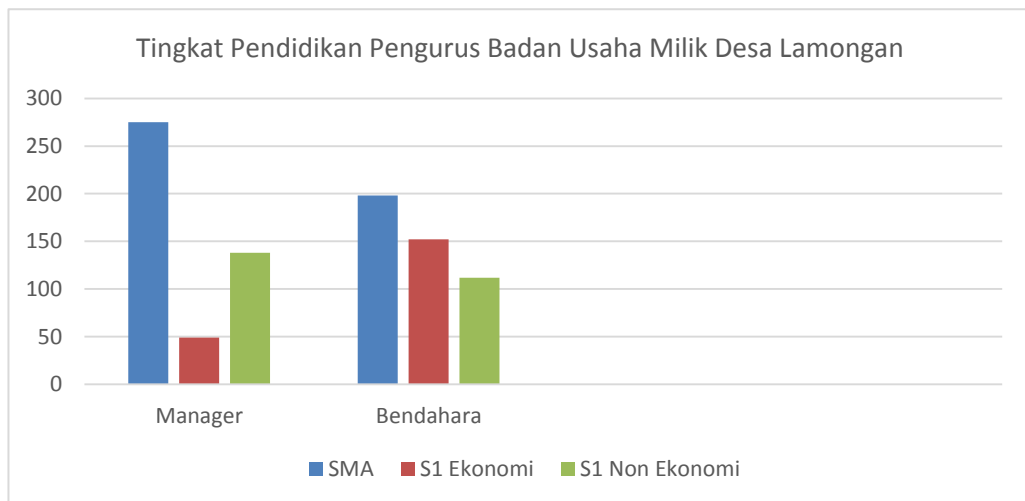
Sumber data: Data diolah peneliti, 2021

Gambar 1.2 Laba Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Lamongan tahun 2018, 2019, dan 2020

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas terlihat bahwa laba yang diperoleh Badan Usaha Milik Desa dari tahun 2018, 2019, 2020 mengalami fluktuasi, data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa adalah pendapatan, biaya, laba bersih, modal dan harta tetapi yang lebih dominan adalah penurunan yang signifikan laba dari tahun 2018, 2019 dan 2020. Data diatas dikelompokkan berdasarkan pendapatan yang memiliki range 20 juta, 40 juta, 60 juta, 80 juta dan 100 juta. Hal

ini karena setelah diamati pendapatan tertinggi yang diperoleh Bumdesa di Lamongan adalah 99.600.000 sedangkan paling rendah adalah 224.800.

Badan Usaha Milik Desa memiliki pendapatan dibawah Rp 20.000.000 ditahun 2018 dan mengalami penurunan di tahun 2019, 2020. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pendapatan Badan Usaha Milik Desa mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2019 dan 2020, padahal modal penyertaan badan usaha milik desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) selalu dialokasikan oleh pihak pemerintah desa. Hal ini menunjukkan alokasi penyertaan modal dari APBDes yang diiringi dengan penurunan pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa perlu diwaspadai karena adanya masalah dalam pengelolaan badan usaha milik desa, sebab hal ini berhubungan dengan ketahanan keuangan yang dimiliki oleh badan usaha milik desa untuk memertahankan keuangan agar profitabilitas badan usaha milik desa menjadi baik, demi keberlangsungan usaha Badan Usaha Milik Desa. Selain faktor penyertaan modal, pemahaman Sumber daya manusia yang terlibat dalam kepengurusan juga dapat mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Kemampuan sumber daya manusia dalam menyikapi dan mengelola suatu hal dapat dilihat dari latar belakang tingkat Pendidikan yang sesuai dengan bidang yang sedang dikerjakan. Gambaran pendidikan pengelola Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan bisa dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini:



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2021)

Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pendidikan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Lamongan.

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, data yang diperoleh pada Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa kabupaten Lamongan, diperoleh data jika dari 462 badan usaha milik desa di kabupaten Lamongan, tingkat Pendidikan Manajer Badan Usaha Milik Desa diketahui sejumlah 275 orang atau sebesar 59,5% berpendidikan SMA, sejumlah 49 orang atau 10,6% berpendidikan S1 Ekonomi dan sejumlah 138 orang atau 29,8% berpendidikan S1 non ekonomi. Tingkat Pendidikan bendahara BUMDesa diketahui sejumlah 198 orang atau 42,8% berpendidikan SMA, sejumlah 152 orang atau 32,9% berpendidikan S1 Ekonomi dan 112 orang atau 24,2% berpendidikan S1 non ekonomi.

Data yang menggambarkan tingkat Pendidikan tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan antara peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimana pengurusan dan pengelolaan Bumdesa dapat membentuk unit usaha meliputi Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, dan pasal 14 dimana persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Hal ini bertentangan dengan tujuan Badan Usaha Milik Desa yang harus dikelola dengan baik agar mendapatkan laba yang maksimal sehingga profitabilitas yang bagus dapat dicapai, maka pengelola Badan Usaha Milik Desa harus dikelola oleh orang yang memiliki kompetensi dan skill dibidang keuangan, dan teknologi. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lamongan memiliki manajer dan bendahara sebagian besar bukan dari lulusan S1 Ekonomi dan Besarnya persentase bendahara yang mayoritas berpendidikan SMA, bahkan diketahui ada beberapa responden berijazah SMP padahal sesuai regulasi minimal pendidikan pengurus BUMDesa adalah SMA. Permasalahan ini mengakibatkan secara umum bendahara Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Lamongan belum dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dikarenakan kurangnya literasi keuangan yang dimiliki oleh bendahara Badan Usaha Milik Desa, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh bendahara. (Bobi PMD, 2022) menyebutkan jika terdapatnya Badan Usaha Milik Desa yang menang dalam kejuaraan, hal ini dikarenakan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan bendahara Badan Usaha Milik Desa dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk memantik dan memotivasi semangat serta kesadaran Badan Usaha Milik Desa yang lain untuk

melengkapi instrument laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa banyak Badan Usaha Milik Desa yang belum memahami literasi keuangan dengan baik. Pola pikir Pengelola Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Lamongan lulusan dengan latar belakang S1 Ekonomi dan non lulusan S1 Ekonomi juga secara tidak langsung akan menunjukkan sikap keuangan (*attitude financial*) dan kecerdasan keuangan (*quotient financial*) seseorang dalam meningkatkan profitabilitas yang tercermin dari diperolehnya laba yang maksimal.

Data Statistik yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) kabupaten Lamongan juga menunjukkan hasil, jika sebagian besar Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Lamongan dalam penyusunan laporan keuangan masih minim dalam penerapan teknologi keuangan. Transaksi yang dilakukan masih manual dan belum memanfaatkan aplikasi khusus dalam mengerjakan laporan keuangan, rata-rata dalam penyusunan laporan keuangan masih memanfaatkan *Microsoft excel* yang sederhana untuk pengerjaannya, sehingga kecerdasan teknologi dapat dinilai masih kurang.

Indeks kinerja Badan Usaha Milik Desa adalah Profitabilitas yang tercermin pada pendapatan adalah hal yang sangat penting terutamanya bagi pemilik perusahaan yaitu pemegang saham, karena modal yang ditanamkan berupa uang yang diinvestasikannya diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang sepadan secara berkesinambungan. Kinerja perusahaan yang baik adalah bisa dilihat dari profitabilitas, dimana pemilik modal menaruh kepercayaannya, tugas utama manajemen atau para manajer pada intinya adalah meningkatkan nilai (*value*) bagi para pemegang saham. Semakin meningkat nilai bagi pemegang saham menjadi penting pula bagi para manajer sendiri karena dapat memberikan nilai positif bagi kompensasi maupun kariernya sehingga akan meningkatkan motivasi baginya untuk senantiasa dapat membuat keputusan yang berdampak kepada penciptaan nilai. Maka, menjadi sangat penting adanya suatu pengukuran kinerja yang representatif atas penciptaan nilai, ditambah yang dapat memberikan gambaran nyata bagi manajemen maupun pemegang saham akan ada atau tidaknya penciptaan nilai tambah tersebut. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah profitabilitas dengan proxy yang dipakai adalah rasio ROA (*Return on Asset*) dan ROE (*Return on Equity*). Tingkat Pengembalian Aset adalah rasio *profitabilitas* yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dengan kata lain, *Return on Assets* atau sering disingkat dengan ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode sedangkan ROE merupakan pengukuran rasio yang menunjukkan



seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan dalam pengembalian labanya pada satu periode. ROA dan ROE dinyatakan dalam persentase (%). *Profitability ratios* menghubungkan *profits to investment*. Salah satu ukuran adalah tingkat pengembalian investasi (ROI), pengembalian asset bersih (ROA) dan pengembalian ekuitas atau modal (ROE). (Timme, 2007 p-150).

Profitabilitas perusahaan yang maksimal merupakan tujuan utama perusahaan, termasuk juga Badan Usaha Milik Desa, untuk meningkatkan profit Badan Usaha Milik Desa, maka pemahaman Literasi keuangan harus dimiliki agar seorang pemimpin memiliki sikap keuangan beserta kecerdasan keuangan. Sementara itu ketahanan keuangan (*Financial Resilience*) akan memperkuat hubungan dari sikap keuangan dan kecerdasan keuangan pada profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. (Iskandar, et. al., 2020).

Penelitian ini banyak didukung oleh penelitian yang lain, seperti (Iskandar, et. al., 2020) menyatakan bahwa kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa di ina huk desa mata air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa laba bersih setelah pajak dikatakan kurang baik sebesar 7,80% dengan standar penilaian industry sebesar 40%. (Ismiyah, et. al., 2020) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan maka harus mengatur kegiatan administrasi keuangannya seperti pencatatan dan pembukuan yang baik dan benar dengan membagikan pembukuan sederhana seperti buku kas dan buku pembantu utang pada Badan Usaha Milik Desa. (Endarto et. al., 2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara literasi keuangan dengan profitabilitas.

Hubungan penelitian tentang literasi keuangan yang baik terbukti menjadi langkah efektif untuk meningkatkan sikap keuangan sehingga kinerja keuangan perusahaan juga baik dan mengarah pada kemampuan perolehan laba. (Adam, et. al., 2021) Literasi Keuangan diartikan juga sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Penelitian (Siswanti, et. al., 2020) menyatakan bahwa sikap keuangan adalah keadaan pikiran, pendapat, dan penilaian tentang keuangan. Sikap keuangan mengacu pada bagaimana perasaan seseorang tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan tanggapan terhadap pernyataan. Sikap terhadap uang memiliki empat dimensi diantaranya percaya bahwa uang adalah simbol kekuatan, uang penting dalam kehidupan, uang dapat menimbulkan kecurigaan dan

ketidakpercayaan orang lain, dan uang adalah simbol kesuksesan. Seseorang yang memiliki sikap yang bagus dinilai dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula.

Kecerdasan keuangan seseorang akan berhasil dalam meningkatkan kinerja keuangan jika didampingi oleh faktor lain. (OJK, 2016) Kecerdasan keuangan adalah kecerdasan untuk mengelola sumber daya (*resources*) potensial menjadi kekayaan riil. Kecerdasan keuangan (*financial*) merupakan *brainware* untuk secara perlahan-lahan menggeser peran pengakumulasi asset dari diri kita sendiri ke asset yang kita miliki. Salah satu hal mendasar aset adalah sifatnya yang terus berakumulasi. Kecerdasan keuangan yang dimiliki seseorang tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Menyikapi persoalan tersebut, Literasi keuangan adalah salah satu konstruk yang sesuai digunakan, untuk meningkatkan kinerja keuangan badan usaha milik desa. (Adam, et. al., 2021) menyatakan bahwa Ada hubungan hubungan positif langsung literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam sikap keuangan, serta positif hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui sikap keuangan terhadap ketahanan kesejahteraan keuangan. (Augustin, et. al., 2020) menyatakan bahwa Penelitian ini juga menemukan peran mediasi dari akses ke keuangan dan sikap risiko keuangan pada hubungan antara literasi keuangan pada kinerja UKM. Dari deskriptif statistik juga ditemukan kelemahan dari pengelola UKM tentang produk bank dan pasar modal. Implikasi dari temuan ini pemerintah perlu membuat program untuk meningkatkan tingkat keuangan literasi di kalangan pengelola UKM terutama keterampilan dan pengetahuan tentang produk bank, manajemen risiko, dan produk pasar modal.

Program literasi keuangan dan sikap kewirausahaan kaum muda: beberapa wawasan dari komunitas Yordania juga menunjukkan bahwa siswa yang menyelesaikan FLP (*financial literacy program*) menunjukkan kesadaran kewirausahaan yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang belum berpartisipasi dalam program (Utami et. al., 2021). Literasi Keuangan (*Financial literacy*) menunjukkan niat kewirausahaan yang jauh lebih rendah daripada mereka yang belum mengambil modul kewirausahaan. Namun, sikap guru (*Teacher Attitude*) tidak berdampak pada sikap siswa (Aljaouni, et. al., 2020).

Literasi keuangan (*Financial Literacy*) merupakan kemampuan individu untuk mengambil keputusan yang cukup besar sehubungan dengan pemanfaatan uang secara efektif dan efisien, hubungan antara tiga variabel independen diselidiki dengan menggunakan analisis jalur untuk pengujian hipotesis. Temuan ini mengungkapkan bahwa sikap keuangan (*Financial Attitude*) dan perilaku keuangan (*Financial Behavior*) memiliki hubungan yang kuat dengan literasi keuangan

(*Financial Literacy*) wanita bekerja daripada pengetahuan keuangan (*Financial Knowledge*). Literasi keuangan menjadi dasar pengetahuan seseorang dalam bersikap atau memposisikan diri untuk mengambil keputusan keuangan, yang mempengaruhi kecerdasan keuangan (Rai, et. al., 2019).

Sikap keuangan merupakan kecenderungan sikap yang bersifat positif atau negatif terhadap uang (Bustarosa, 2018). Menurut (Siswanti, et. al., 2020) menyatakan bahwa pengetahuan keuangan, sikap keuangan, pengendalian diri, berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan, pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kontrol-diri, sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian diri, pengendalian diri memediasi pengaruh parsial pengetahuan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan, dan pengendalian diri memediasi pengaruh parsial sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan.

Penelitian (Adam et. al., 2021) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara literasi keuangan dan inklusi keuangan dengan sikap keuangan, serta hubungan positif antara literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui sikap keuangan terhadap ketahanan kesejahteraan keuangan. Kemudian ada kontribusi positif langsung dari sikap keuangan terhadap ketahanan keamanan keuangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kontribusi sikap keuangan dapat memberikan stimulus positif dalam mengukur ketahanan kesejahteraan keuangan dari indikator persepsi, kekuatan, ketidakcukupan, retensi yang terdapat pada sikap keuangan. (Fares, 2021) menyatakan bahwa ketahanan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dimana penundaan pembelian dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan dan rasio *leverage* keuangan (perdagangan rasio, pengganda ekuitas) dan rasio kas dan negasi arus kas terhadap indikator kinerja keuangan, karena mampu merespon secara efektif guncangan tak terduga pembeli dan menghindari risiko kebangkrutan, menghadapi kewajiban keuangan dan menciptakan peluang investasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya yaitu (Theodorou et. al., 2008) Ditemukan bahwa efek TI terhadap kinerja keuangan diamati lebih besar untuk perusahaan. teknologi keuangan dalam perusahaan sangat mempengaruhi kinerja keuangan yang menekankan tingkat strategi fleksibilitas lebih tinggi dan strategi biaya tingkat menengah serta memberikan kemudahan pelaku dalam mengelola kinerja keuangan.

Penelitian lain dengan judul *Financial Literacy in Japan: New Evidence Using Financial Knowledge, Behavior, and Attitude* yang dilakukan oleh (Kadoya et. al., 2020) menyimpulkan hasil bahwa keseimbangan asset keuangan diiringi dengan adanya teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap sikap, kecerdasan

dan kinerja keuangan. Literasi yang dimiliki laki-laki maupun perempuan mampu terkait positif dengan sikap sehingga kinerja keuangan yang ditangani juga terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chepnetich, 2016) dengan judul *Effect of Financial Literacy and Performance SMEs*. Temuan ini menunjukkan efek signifikan dari meminjam literasi keuangan dan penganggaran literasi keuangan terhadap kinerja UKM. Disarankan agar pemilik UKM meningkatkan pelatihan di perhitungan suku bunga dan perlu memiliki keahlian anggaran karena mereka menentukan apakah anggaran akan dilaksanakan seperti yang dipersiapkan atau tidak. Akhirnya, ada kebutuhan bagi karyawan untuk memiliki keterampilan pelaporan dan analisis yang diperlukan.

Penelitian (Shih et. al., 2013) Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang memiliki retensi dan sikap pencapaian harga diri terhadap uang membuat keuangan berisiko tinggi. Keputusan, kecemasan terhadap uang cenderung ada terutama pada investor berisiko rendah. Literasi keuangan mempengaruhi sikap keuangan konsumen, dan variabel demografis memainkan peran segmentasi.

Penelitian terdahulu dari (Dai et. al., 2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha ingin meningkatkan ketahanan keuangan bisnis karena dengan demikian mereka dapat membuka bisnis di bidang lain, dan itu mereka memperoleh pengetahuan keuangan mereka dari pendidikan, kursus pelatihan, dan keluarga/anak-anak. Hasilnya menunjukkan pengaruh signifikan dari sikap keuangan dan literasi keuangan terhadap ketahanan keuangan.

Penelitian lain dari (Nkundabanyanga et. al., 2019) dengan judul *Firm characteristics, innovation, financial resilience and survival of financial institutions*. Para penulis menemukan bahwa karakteristik yang kuat dari ukuran, usia, inovasi dan ketahanan keuangan memiliki kekuatan prediktif pada kinerja keuangan serta kelangsungan hidup perusahaan kepentingan publik seperti lembaga keuangan.

Hasil penelitian ini berbeda, dimana penelitian ini tidak mensupport variabel penelitian ini. Kompetensi individu mencerminkan kecerdasan emosional. (Bass dan Riggio, 2006), dalam (Mujanah, et. al., 2019) yang terdiri dari kesadaran diri, kepercayaan diri, pengendalian diri, komitmen, integritas, kemampuan berkomunikasi dan mempengaruhi, serta kemampuan untuk memulai dan menerima perubahan. Kecerdasan keuangan (*financial quotient*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja para wirausahawan, hal ini dikarenakan para wirausahawan di Indonesia masih memiliki pengetahuan yang minim di bidang keuangan. Sikap keuangan menjadi salah faktor yang dapat memengaruhi perilaku keuangan masyarakat, dimana Sikap keuangan diartikan sebagai keadaan pikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan. Serta sikap keuangan pribadi merupakan kontributor penting untuk kesuksesan atau kegagalan keuangan masyarakat.

Penelitian (Dewi et. al., 2020) menyatakan bahwa Sikap keuangan dan keterampilan keuangan keduanya tidak memiliki korelasi dengan perilaku pengelolaan keuangan. Sedangkan (Herdjiono et. al., 2016) menyatakan bahwa kecerdasan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap keuangan, kemudian sikap keuangan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hasil penelitiannya menolak keberadaan teori tentang faktor yang diperlukan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian (Wu et. al., 2021) hasil penelitiannya adalah perkembangan fintech memiliki dampak negatif pada profitabilitas SOB dan hasil regresi dari OLS estimasi, estimasi FGLS, estimasi Prais-Winsten dan estimasi FE adalah dibandingkan untuk memastikan validitas inferensi statistic.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cohen et. al., 2017) yang menyatakan bahwa sikap dan teknologi keuangan tidak berpengaruh terhadap ketahanan keuangan. Ketahanan keuangan suatu perusahaan lebih terkait dengan besaran sumber modal dan bauran pemasaran terhadap suatu produk untuk menghasilkan laba. Teknologi keuangan menciptakan kemudahan dalam pengelolaan keuangan namun dalam perusahaan faktor itu tidak signifikan menjadi penyebab ketahanan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan penelitian (Sukroni, 2017) dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Kecerdasan Spiritual Pada Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Di Surabaya. Pada penelitian ini diperoleh hasil penelitian jika literasi keuangan berpengaruh positif tidak signifikan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Basmar et. al., 2021) dengan judul literasi keuangan di masa pandemi covid 19 (FLC19) dan pengaruhnya terhadap siklus ketahanan keuangan di indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tipe tekanan literasi keuangan positif (FLC19+) bertekanan 0.015 Amplitudo yang menandakan adanya pertumbuhan perekonomian, sementara untuk tipe tekanan literasi keuangan negatif (FLC19-) bertekanan -0.024 Amplitudo yang menandakan ketidakstabilan keuangan dalam perekonomian Indonesia selama Pandemi Covid 19. Dijelaskan bahwa literasi keuangan tidak mempengaruhi kinerja maupun ketahanan keuangan suatu negara, namun hal yang menjadi faktor penentu utama ketahanan keuangan adalah iklim perekonomian dunia.

Penelitian (Akimas et. al., 2016) menyatakan bahwa Kecerdasan intelektual (IQ) berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja; dan Kecerdasan emosional (EQ) berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja. Sementara itu (Pangestuti, 2021) menyatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada generasi milenial di Kabupaten Jepara.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah terletak pada kerangka konseptual, yaitu posisi setiap variabelnya. Dimana ketahanan keuangan (*financial resilience*) berfungsi sebagai moderasi antara sikap keuangan (*financial attitude*), dengan profitabilitas (*profitability*). ketahanan keuangan (*financial resilience*) berfungsi sebagai moderasi antara kecerdasan keuangan (*financial quotient*), dengan profitabilitas (*profitability*). Sementara penelitian terdahulu ketahanan keuangan (*financial resilience*) sebagai variabel independen atau variabel dependen. Selain itu pada penelitian terdahulu variabel literasi keuangan banyak dilakukan di perbankan dan perusahaan konvensional lainnya, namun pada penelitian ini mencoba menggali literasi keuangan dari sisi Badan Usaha Milik Desa. Kesenjangan pengetahuan mengenai sikap keuangan dan kecerdasan keuangan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa dalam hubungan antara literasi keuangan dan profitabilitas merupakan bentuk ketahanan keuangan suatu badan usaha. Variabel teknologi keuangan juga ditawarkan sebagai keterbaruan dalam penelitian ini karena pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Lamongan masih belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi keuangan dalam proses pengerjaan laporan keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas sebelumnya maka rumusan masalah yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
2. Apakah Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
3. Apakah Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
4. Apakah Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
5. Apakah Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?

6. Apakah Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
7. Apakah Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
8. Apakah Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
9. Apakah Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
10. Apakah Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) melalui Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
11. Apakah Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) melalui Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
12. Apakah Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) melalui Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
13. Apakah Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) melalui Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
14. Apakah Ketahanan Keuangan (*Financial Resilience*) mampu berperan sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dengan Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?
15. Apakah Ketahanan Keuangan (*Financial Resilience*) mampu berperan sebagai variabel moderasi signifikan terhadap hubungan Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) dengan Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menguji dan menganalisis Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menguji dan menganalisis Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
4. Untuk menguji dan menganalisis Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
5. Untuk menguji dan menganalisis Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
6. Untuk menguji dan menganalisis Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
7. Untuk menguji dan menganalisis Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
8. Untuk menguji dan menganalisis Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
9. Untuk menguji dan menganalisis Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
10. Untuk menguji dan menganalisis Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) melalui Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
11. Untuk menguji dan menganalisis Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) melalui Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
12. Untuk menguji dan menganalisis Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) melalui Sikap



- Keuangan (*Financial Attitude*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
13. Untuk menguji dan menganalisis Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Profitability*) melalui Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
  14. Untuk menguji dan menganalisis Ketahanan Keuangan (*Financial Resilience*) mampu berperan sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dengan Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.
  15. Untuk menguji dan menganalisis Ketahanan Keuangan (*Financial Resilience*) mampu berperan sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*) dengan Profitabilitas (*Profitability*) pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lamongan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan teori, dan kajian ilmu terbaru yang relevan dengan Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) pada bidang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mengaplikasikan ilmu ekonomi terutama pada manajemen keuangan. Sumber referensi bagi peneliti yang berkeinginan meneliti atau mengembangkan penelitian tentang Literasi Keuangan (*Financial Literacy*), Teknologi Keuangan (*Financial Technology*), Sikap Keuangan (*Financial Attitude*), Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*), Profitabilitas (*Profitability*), dan Ketahanan Keuangan (*Financial Resilience*).

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada penentu kebijakan Usaha Mikro pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di kabupaten Lamongan, bahwa penting mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan Profitabilitas (*Profitability*). Aspek tersebut adalah

Literasi Keuangan (*Financial Literacy*), Teknologi Keuangan (*Financial Technology*), Sikap Keuangan (*Financial Attitude*), Kecerdasan Keuangan (*Financial Intelligence*), dan Ketahanan Keuangan (*Financial Resilience*) agar terwujud Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baik dari segi Profitabilitas, sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Lamongan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat dari bawah seperti pada cita-cita pendirian Badan Usaha Milik Desa.